KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kelas menengah kian sempit
Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Kelas Menengah kian Terimpit

Pengetatan pembelian BBM subsidi dinilai tidak akan efektif untuk menekan pelebaran defisit APBN.

INSI NANTIKA JELITA
insi@mediaindonesia.com

RENCANA pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang diperkirakan bakal kian menambah beban masyarakat kelas menengah.

Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menilai kelompok menengah akan menjadi kelompok yang paling terdampak bila akses terhadap BBM subsidi dibatasi. Pasalnya, selama ini kelas menengah berada di luar skema perlindungan sosial.

"Beban kelas menengah makin bertambah. Pembatasan BBM subsidi menyebabkan alokasi anggaran rumah tangga menjadi lebih ketat," ungkap Wahyudi kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Fakta lain ialah kelompok menengah merupakan kontributor pajak paling besar untuk Indonesia dengan perkiraan kelas menengah memiliki kontribusi sekitar 43% dari total konsumsi rumah tangga. "Kelompok menengah posisinya semakin terimpit. Bayar pajak lebih banyak, tapi subsidi yang mereka terima terbatas. Sementara itu, orang-orang superkaya diberi subsidi atau insentif gila-gilaan," imbuhnya.

Senada, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menyebut selama ini kalangan menengah sudah terbebani dengan berbagai macam tarif dan harga mahal dari barang kebutuhan pokok, biaya kuliah, hingga tingkat suku bunga yang tinggi.

"Golongan menengah ini sudah babak belur sejak pandemi. Ini akan ditambah dengan pengetatan penggunaan BBM subsidi," ujar Yayan, kemarin.

Ia pun menilai jika tujuannya untuk menekan pelebaran defisit anggaran, sesungguhnya langkah pembatasan pembelian BBM subsidi tidak efektif. Itu disebabkan problem defisit anggaran tersebut sebetulnya dipicu oleh ketidakdisiplinan pemerintah dalam mengelola keuangan publik atau APBN.

"Saya tidak yakin pembatasan BBM subsidi 100% akan efektif. Manajemen APBN tidak disiplin dan objektif yang mengutamakan keputusan politik (lebih kentara) ketimbang *real economics*," jelasnya.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan ketidaktepatsasaran distribusi BBM subsidi bukan alasan untuk memberlakukan pembatasan. Justru distribusinya yang harus diperbaiki agar masyarakat betul betul merasakan keadilan manfaat subsidi untuk bangkit dari kesulitan ekonomi.

"Wacana ini, kan, sudah lama berkembang karena diketahui terjadi ketidaktepatsasaran yang memicu ketidakadilan distribusi BBM subsidi. Padahal BBM subsidi itu, kan, ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan, tapi nyatanya pemerintah mengambil sikap pembiaran," kata dia.

Belum diputuskan

Di lain pihak, PT Pertamina (persero) menyatakan akan mulai mengontrol ketat pembelian BBM subsidi jenis pertalite pada bulan depan sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Arahan itu sebelumnya datang dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menegaskan untuk mengatasi defisit APBN 2024, pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang.

"Pertamina selaku BUMN akan menjalankan arahan pemerintah," ujar VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, kemarin.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir justru mengatakan masih menunggu penugasan. Soal kebijakan pembatasan BBM subsidi akan berlaku kapan dan di mana, Erick belum mengetahui informasi itu. "Saya belum bisa komentar karena saya belum tahu, dalam arti apakah 17 Agustus, atau Januari tahun depan, November, atau Desember, saya tidak tahu. Kita tunggu saja," kata Erick di kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyebut wacana itu belum diputuskan dan akan dirapatkan lagi. Begitu pula dengan revisi Perpres No 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, ia menuturkan hal itu masih akan didiskusikan bersama Presiden Jokowi.

"Bukan belum *goal*, kan, mesti dirapatkoordinasikan dulu. Tentu ada perhitungan konsekuensi fiskal juga," ungkap Airlangga. (Try/Van/X-3)